

Katalog BPS: 2301104.51

Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2013



STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI BALI 2013

ISSN : 2356-4326
Katalog BPS : 2301104.51
Nomor Publikasi : 51520.1402
Ukuran Buku : 14,8 cm x 32 cm
Jumlah Halaman : vii + 31 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Panusunan Siregar
- Penanggung Jawab Teknis : Indra Susilo
- Koordinator : A A Gede Dirga Kardita
- Anggota : Nindya Purnama Sari

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2013 ini merupakan publikasi rutin yang disusun setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Triwulanan sepanjang tahun 2013, untuk memberikan gambaran kondisi Pendidikan di Bali secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bagian, yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka buta huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penyajian publikasi ini disusun secara diskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang, SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA.

Denpasar, September 2014
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,

Panusunan Siregar
NIP. 19580314 198302 1 001



PANGAWEJANG STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologi statistiknya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan.
5. Data bagaikan Kompas dan Pelita.

copyright@panusunan_siregar

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
PANCAWEJANG STATISTIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. Metodologi	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Kerangka Sampel	5
2.3. Rancangan Sampel	6
2.4. Metode Pengumpulan Data	6
2.5. Pengolahan Data	7
BAB III. Konsep Dan Definisi	8
BAB IV. Pembahasan	11
4.1. Angka Partisipasi Sekolah	12
4.1.1. Angka Partisipasi PAUD	12
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	14
4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)	18
4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)	20
4.2. Angka Buta Huruf	23
4.3. Penduduk Yang Tidak Bersekolah Lagi	26
4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	29
BAB V. Penutup	30
5.1. Kesimpulan	30

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali 2014.....	14
Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali 2013	16
Tabel 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	19
Tabel 4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	21
Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	27
Tabel 6. Persentase penduduk 7-18 Tahun Menurut Alasan Tidak Bersekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali 2013.....	28

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun, Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	15
Gambar 2.	APK Pendidikan SD, SMP, dan SMA, Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	20
Gambar 3.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	24
Gambar 4.	Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2013	25
Gambar 5.	Persentase Penduduk Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013	29

<http://bali.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN



1. 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Demikian pentingnya pembangunan dibidang pendidikan, karena itu maka sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat: **"MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA"**.

Pada umumnya pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SMP atau sederajat), pendidikan menengah (meliputi SMA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin,1996:24). Tidak sedikit memang kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Disamping sarana dan prasarana pendidikan seperti; jumlah sekolah, kuantitas serta kualitas guru, berbagai hal-hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait. Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi, terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang

mempengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antar penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan, disamping kultur sosial dan budaya yang berbeda antar daerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang pendidikan ini mendapat perhatian serius pembangunan daerah Bali, mengingat Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga hanya mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Bali bersaing dalam tataran global.

Dalam publikasi ***"Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2013"*** ini disajikan data pendidikan yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 berupa rangkuman beberapa indikator pendidikan.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Bali akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

1. 2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain adalah:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Bali.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Bali untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik khususnya di bidang pendidikan.
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam mengevaluasi pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan.

1. 3. SUMBER DATA

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor tahun 2012. Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak diseluruh Indonesia. Untuk Provinsi Bali, sampelnya tersebar di sembilan kabupaten/kota mencakup seluruh kecamatan baik wilayah perkotaan dan perdesaan.

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini tersusun dalam 5 (lima) bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika;

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.
- BAB IV. PEMBAHASAN, meliputi Angka partisipasi Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Putus Sekolah, Penduduk Tidak Sekolah, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- BAB V. PENUTUP
- TABEL-TABEL LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI



Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara triwulanan tahun 2013. Data yang digunakan dalam publikasi ini merupakan sampel kumulatif dari empat triwulan yang ada di Tahun 2013. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. RUANG LINGKUP

Susenas 2013 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga tersebar dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Provinsi Bali, jumlah sampelnya sebanyak 5.760 rumah tangga, tersebar dalam 576 blok sensus¹ di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2.2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus terdiri dari 2 jenis yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan di setiap kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP2010). Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil update daftar hasil SP2010 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P

2.3. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 dilaksanakan setiap triwulanan, data yang dikumpulkan triwulanan selama setahun akan digunakan untuk memperkirakan (*estimasi*) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap dimana; **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus *secara Probability Proportional to Size (PPS)² – Linear Systematic Sampling* dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk 2010. **Tahap kedua**, dari sejumlah rumah tangga hasil update di setiap blok sensus terpilih dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*³.

2.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan

² *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu design pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya size unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan size banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

³ *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pengeluaran.

tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan, dilakukan mulai dari pengolahan manual (prakomputer) meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

<http://bali.bps.go.id>

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI



Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini adalah:

Sekolah adalah sekolah formal maupun non formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah (*play group* dan taman kanak-kanak), kursus-kursus (mengetik, komputer, bahasa dan sejenisnya), kursus kedinasan (Seskoad, Diklatpim IV, III, II, Lemhanas) dan kejar paket A, B, atau C sebagai sekolah nonformal.

Seseorang dikatakan ***sedang/masih bersekolah*** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. ***Aktif mengikuti pendidikan*** maksudnya bahwa ia secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian.

Jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi tiga yaitu;

1. ***Jenjang pendidikan dasar*** meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau yang sederajat, serta Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.
2. ***Jenjang pendidikan menengah*** meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.
3. ***Jenjang pendidikan tinggi*** meliputi semua pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah, terbagi dalam dua jalur;

Program Gelar (Strata atau disebut juga Jalur Akademik) yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian akademik mengenai penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi mencakup pendidikan sarjana muda (S0), sarjana/strata-1 (S1), strata-2 (S2) dan strata-3 (S3)

Program Non Gelar (Non Strata atau disebut juga Jalur Profesional) yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Program ini pada umumnya adalah program pendidikan diploma, yang meliputi Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII)/ setara dengan sarjana muda dan Diploma IV (DIV)/ setara dengan sarjana.

Status pendidikan adalah keadaan seseorang/penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi:

1. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.
2. **Masih bersekolah** adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
3. **Tidak bersekolah lagi** adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Penduduk dikatakan **mampu baca tulis** jika dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

BAB IV

PEMBAHASAN



Dalam menyusun indikator pendidikan indikator-indikator diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat dan (3) pendidikan kedinasan. Oleh karena publikasi ini sebagian besar sumber datanya berasal dari susenas, maka dalam ulasannya hanya mencoba menguraikan tentang pendidikan umum saja. Pendidikan umum karena maknanya kurang lebih sama dengan pendidikan formal maka indikator yang diidentifikasi berlaku untuk:

1. Jenjang pendidikan dasar yang meliputi pendidikan Prasekolah, pendidikan Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah, SDLB dan SD Terpadu).
2. Pendidikan menengah yang meliputi menengah pertama umum/Madrasah Tsanawiyah maupun kejuruan dan menengah lanjutan umum/Madrasah Aliyah maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah tinggi maupun Akademi.

Gambaran tentang pendidikan di Provinsi Bali dapat diukur dengan beberapa indikator pendidikan. Ada empat indikator utama yang sering digunakan adalah pertama, Angka Partisipasi Sekolah bagi penduduk usia sekolah 7-18 tahun (SD hingga SLTA), sebagaimana harapan pemerintah bahwa penduduk usia tersebut adalah penduduk yang dijadikan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan. Kedua, Angka Buta Huruf (ketidakmampuan baca tulis penduduk) dari penduduk usia 15 tahun atau lebih, dimana diharapkan pada kelompok umur tersebut penduduk sudah dapat membaca dan menulis. Ketiga, Angka anak putus sekolah dengan

mencoba melihat gambaran anak yang berada pada kelompok usia pendidikan 7-18 tahun akan tetapi kondisi mereka dalam keadaan tidak aktif bersekolah. Dan keempat, adalah angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berupa persentase penduduk yang minimal tamat SLTA, karena diharapkan dengan lulus SLTA, penduduk sudah memiliki kualitas yang cukup memadai untuk bersaing di pasar kerja. Empat indikator utama bidang pendidikan di Provinsi Bali tahun 2013 seperti uraian berikut:

4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA, Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok dimana Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut:

4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan pra sekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syaraf motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2013, menunjukkan bahwa angka partisipasi PAUD (4-6 tahun) di Provinsi Bali mencapai 51,52 persen. Angka partisipasi PAUD di Bali tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena perhatian Pemerintah Provinsi Bali yang cukup serius terhadap anak usia dini di Bali. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 4-6 tahun, lebih dari 51 orang yang sudah mengikuti pendidikan. Ini berarti pemahaman orang tua sudah mulai berkembang akan pentingnya pendidikan pada anak usia dini.

Dilihat dari Paritas Gender (PG) dimana PG merupakan selisih antara penduduk laki-laki terhadap perempuan, terlihat bahwa nilai PG partisipasi PAUD Bali tahun 2013 sebesar 1,36 persen. Ini menandakan persentase anak laki-laki umur 4-6 tahun yang mengikuti pendidikan lebih banyak dibandingkan anak perempuan diusia yang sama. Indikator kesenjangan lainnya adalah Indek Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki-laki. Pada tahun 2013, IPG Bali menunjukkan nilai 0,97 persen yang berarti di Bali angka kesetaraan gender berada sedikit di bawah ambang batas kesenjangan

gender, dimana persentase laki-laki yang sekolah PAUD pada usia 4-6 tahun lebih banyak dibandingkan persentase perempuan.

Tabel 1

Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali 2013

Kabupaten/Kota	Ya, pernah/sedang Sekolah			PG	IPG
	Laki	Prp	Laki+Prp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jembrana	30,24	45,85	38,00	-15,61	1,52
2. Tabanan	62,00	58,67	60,25	3,33	0,95
3. Badung	62,19	65,02	63,43	-2,83	1,05
4. Gianyar	52,97	68,03	60,11	-15,06	1,28
5. Klungkung	64,49	58,16	61,33	6,33	0,90
6. Bangli	28,49	33,07	30,72	-4,58	1,16
7. Karangasem	31,82	27,41	29,74	4,42	0,86
8. Buleleng	30,51	27,90	29,19	2,61	0,91
9. Denpasar	72,38	56,70	64,78	15,68	0,78
BALI	51,05	49,02	50,07	2,03	0,96

Sumber : Susenas 2013

4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS), dimana APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut :

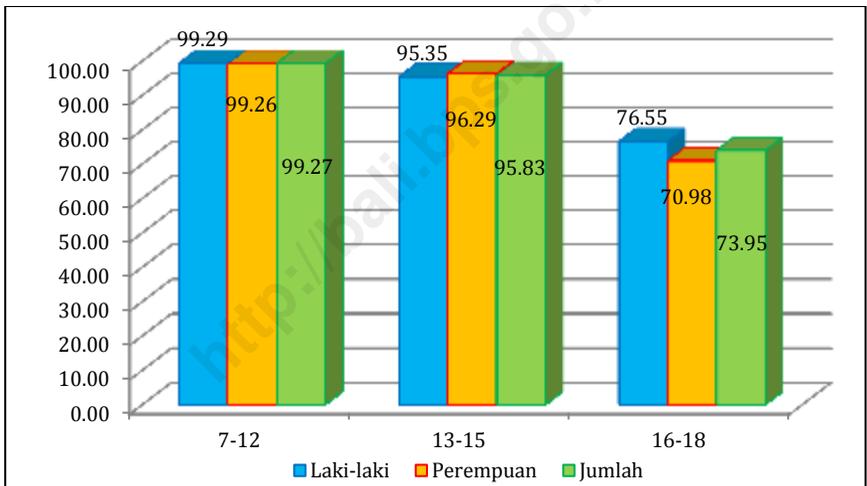
$$\text{APS SD} = \left[\frac{\text{Penduduk 7-12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

$$\text{APS SMP} = \left[\frac{\text{Penduduk 13-15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

$$\text{APS SMA} = \left[\frac{\text{Penduduk 16-18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2013 dan menggunakan formulasi diatas dapat disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun, Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013



Sumber : Susenas 2013

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS SD mendekati 100 persen, artinya bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun di Bali sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada jenjang pendidikan SLTP (13-15 tahun) baru mencapai 95,83 persen, lain halnya pada jenjang pendidikan SLTA (16-18 tahun) angka APS baru mencapai 73,95 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang sangat mencolok

antara laki-laki dan perempuan, berarti pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin terkikis.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, Tabel 2 dibawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Bali.

Tabel 2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013

Kabupaten/Kota	APS 7 - 12 th			APS 13 - 15 th			APS 16 - 18 th		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Jembrana	100,00	100,00	100,00	96,91	97,77	97,35	57,78	65,88	61,71
2. Tabanan	98,96	100,00	99,47	91,63	99,25	94,95	82,10	83,92	83,05
3. Badung	99,74	100,00	99,85	96,83	96,52	96,67	85,40	79,70	82,25
4. Gianyar	99,01	100,00	99,48	94,29	92,63	93,48	82,87	70,14	76,91
5. Klungkung	100,00	100,00	100,00	95,57	97,64	96,65	76,66	92,05	82,77
6. Bangli	99,25	100,00	99,59	96,26	94,47	95,27	64,74	59,39	62,22
7. Karangasem	97,91	99,46	98,62	94,62	94,47	94,53	72,42	70,31	71,54
8. Buleleng	98,89	97,53	98,24	94,65	95,35	94,98	71,52	69,17	70,37
9. Denpasar	100,00	98,79	99,38	97,41	98,55	98,04	81,13	62,56	73,55
BALI 2013	99,29	99,26	99,27	95,35	96,29	95,83	76,55	70,98	73,95
2012	99,23	99,16	99,20	95,99	94,33	95,15	72,71	68,53	70,80

Sumber : Susenas 2013

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 Tahun

Secara umum angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 tahun di Provinsi Bali mengalami sedikit peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. APS Bali tahun 2012 sebesar 99,20 persen meningkat menjadi 99,27 persen di tahun 2013. Jika dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, APS usia 7-12 tahun seluruh kabupaten/kota di Bali tahun 2013 mencapai lebih dari 98 persen. Bahkan APS Kabupaten Jembrana dan Klungkung mencapai 100

persen. Tingginya angka APS di Bali ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun sebagai upaya untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup berhasil.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS pada tingkat SD meskipun sama-sama mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. APS Bali tahun 2013 masih berada di angka 95 persen. Namun jika diperhatikan menurut kabupaten/kota, terjadi peningkatan batas bawah pencapaian APS di tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2012, masih terdapat kabupaten yang APSnya berada dibawah 90 persen, namun pada tahun 2013 APS seluruh kabupaten/kota mencapai lebih dari 93 persen. Pencapaian APS ini tentu tidak terlepas dari program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah masing-masing daerah. Dilihat dari sisi gender, APS Bali usia 13-15 tahun tidak terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua dari sisi pendidikan setara antara laki-laki maupun perempuan.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun

Seiring dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, APS usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. APS Bali tahun 2013 mencapai 73,95 persen atau naik sebesar 3,15 poin dibandingkan tahun 2012. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini,

APS yang dicapai kabupaten/kota masih dikisaran 60 hingga 80 persen. Masih rendahnya APS Bali mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan ditahun-tahun yang akan datang. Dilihat dari sisi gender, dari tahun ke tahun APS usia 16-18 tahun untuk laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan. Pada usia ini persentase perempuan yang masih mengenyam bangku pendidikan mulai berkurang. Tingkat pendidikan yang dirasa sudah cukup untuk perempuan dan mulai beralihnya kegiatan perempuan menjadi bekerja atau mengurus rumah tangga dimungkinkan menjadi penyebab rendahnya APS perempuan.

4.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari pada target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, dan SLTA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

$$\text{APK SLTP} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

$$\text{APK SLTA} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SLTA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2011 dan menggunakan formulasi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota,
Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013

Kabupaten/ Kota	APK SD			APK SLTP			APK SLTA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Jembrana	117,75	102,02	110,43	83,52	102,32	93,14	54,06	66,43	60,06
2. Tabanan	108,52	102,26	105,47	91,56	93,62	92,46	102,82	107,30	105,14
3. Badung	99,91	106,93	103,04	108,90	102,01	105,44	85,10	65,67	74,35
4. Gianyar	112,38	108,97	110,75	81,97	84,17	83,04	103,94	81,87	93,60
5. Klungkung	102,81	108,07	105,42	82,80	79,32	80,98	108,61	141,79	121,78
6. Bangli	105,01	107,38	106,09	83,70	84,51	84,15	69,88	66,90	68,48
7. Karangasem	117,45	108,41	113,30	85,37	96,74	91,82	73,24	69,39	71,63
8. Buleleng	107,13	101,67	104,52	84,79	78,27	81,73	84,00	87,29	85,62
9. Denpasar	105,45	96,82	101,02	103,22	119,48	112,25	77,87	55,96	68,92
BALI 2013	107,92	103,56	105,84	91,27	96,38	93,87	83,30	76,41	80,08
2012	101,42	96,11	98,87	91,92	99,43	95,73	86,15	86,85	86,47

Sumber: Susenas 2013

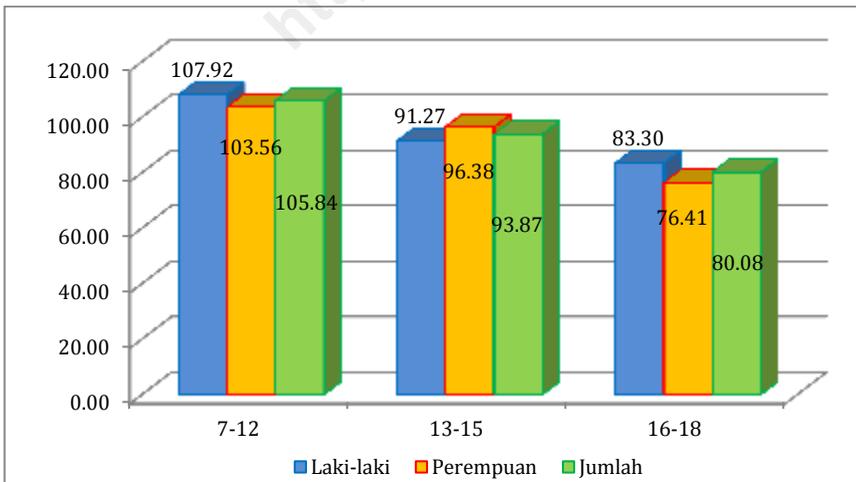
Dari tabel diatas terlihat bahwa APK SD di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 105,84 persen, yang berarti selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berumur kurang

dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama. Kondisi ini terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada tahun 2013, APK SD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 113,30 persen sedangkan yang terendah adalah Kota Denpasar (101,02 persen).

Namun demikian, peningkatan yang terjadi pada APK SD tidak dibarengi dengan peningkatan APK SLTP dan SLTA. APK SLTP tahun 2013 sebesar 93,87 persen, atau menurun sebesar 1,86 poin di banding tahun 2012. Sedangkan APK SLTA juga mengalami penurunan sebesar 6,39 poin dari 86,47 persen di tahun 2012 menjadi 80,08 persen di tahun 2013.

Tingginya angka APK pada jenjang pendidikan SD dan SLTP menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahunnya mengingat bahwa APK tidak memperhatikan umur dalam penghitungannya.

Gambar 2
 APK Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA
 Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Bali Tahun 2013



Sumber : Susenas 2013

4.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS dan APK diatas masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). Yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS diatas, APM ini juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan yaitu pada jenjang SD, SLTP dan SLTA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \mathbf{APM\ SD} &= \left[\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right] \times 100 \\ \mathbf{APM\ SLTP} &= \left[\frac{\text{Jumlah Murid SLTP Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right] \times 100 \\ \mathbf{APM\ SD} &= \left[\frac{\text{Jumlah Murid SLTA Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right] \times 100 \end{aligned}$$

Tabel 4
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SLTP			APM SLTA		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Jembrana	100,00	96,38	98,32	81,07	94,41	87,90	54,06	61,39	57,62
2. Tabanan	88,93	89,13	89,03	69,69	64,68	67,51	75,64	79,83	77,81
3. Badung	92,26	89,80	91,17	88,67	78,78	83,70	78,41	64,49	70,71
4. Gianyar	96,44	96,48	96,46	73,54	77,09	75,26	77,43	62,51	70,44
5. Klungkung	95,77	99,51	97,63	64,69	76,11	70,66	65,44	87,23	74,09
6. Bangli	99,25	98,76	99,03	78,79	75,64	77,04	60,27	50,37	55,60
7. Karangasem	97,91	98,36	98,12	75,31	89,82	83,54	64,25	62,15	63,37
8. Buleleng	96,59	97,53	97,04	78,23	78,27	78,25	68,96	65,25	67,13
9. Denpasar	93,27	86,42	89,76	85,42	91,88	89,00	76,44	50,09	65,68
BALI 2013	95,10	93,39	94,28	78,78	82,53	80,69	71,15	62,48	67,10
2012	93,42	88,51	91,06	75,53	74,62	75,07	65,01	61,23	63,28

Sumber : Susenas 2013

Pada tahun 2013, Angka Partisipasi Murni (APM) Bali di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

A. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2013, APM SD di Bali mencapai 94,28 meningkat 3,22 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Tabel 4 terlihat jelas perbedaan angka APM Bali dari tahun 2012 antara laki-laki dan

perempuan. Seiring dengan waktu, perbedaan APM SD antara laki dan perempuan semakin berkurang. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di SD.

B. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP di Bali mengalami peningkatan dari 75,07 persen di tahun 2013 menjadi 80,69 di tahun 2012. Peningkatan APM SLTP ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Hanya Kabupaten Tabanan dan Gianyar saja yang mengalami penurunan APM SLTP. Jika dilihat dari sisi gender, APM SLTP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan, artinya kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di Bali sangat kental prinsip patrilinealismenya, namun hal tersebut tidak berlaku pada dunia pendidikan.

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SLTP, pada tahun 2013 APM SLTA Bali juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 APM SLTA mencapai 63,28 persen, meningkat menjadi 67,10 persen di tahun 2013. Meskipun APM SLTA terendah dibandingkan APM kelompok lainnya, namun peningkatan APM SLTA ini dapat menggambarkan peningkatan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Peningkatan APM juga terjadi di tingkat pendidikan tinggi. Namun, semakin meningkat kategori pendidikan, maka semakin rendah capaian APMnya. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan persepsi akan tercukupinya pendidikan untuk dapat memasuki pasar tenaga kerja. Akan tetapi, penerapan penghitungan APM untuk pendidikan tinggi sebenarnya tidak begitu relevan. Salah satu terkendala dalam menentukan kelompok umur yang tepat karena banyaknya variasi dalam lamanya program-program di tingkat pendidikan ini.

4.2. ANGKA BUTA HURUF

Angka Buta Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca yang dimaksud di sini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Negara Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani MDGs (*Milenium Development Goals*) yang di luncurkan oleh *United Nation (PBB)*, bahwa pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan marginal telah dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, termasuk Bali juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

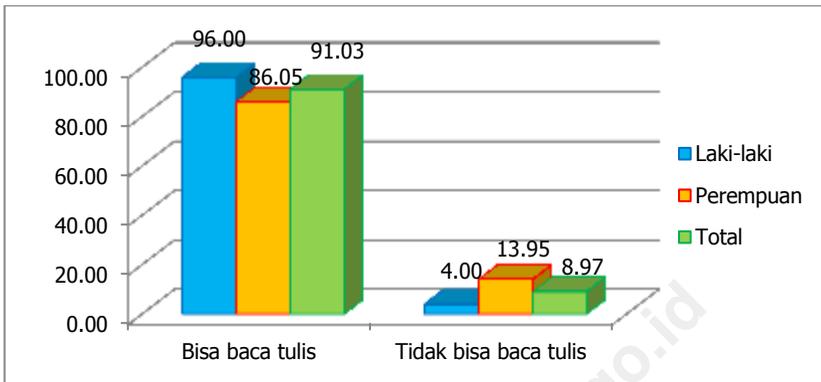
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap

pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2013 tercatat penduduk Bali yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 91,03 persen, meningkat hampir 1 poin dibandingkan tahun 2012 yang nilainya sebesar 90,17 persen. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 8,97 persen.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk antara lain program kejar paket A, paket B dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Pada tahun 2013, sebanyak 8,97 persen penduduk Bali usia 15 tahun ke atas masih buta huruf. Pada Gambar 6 tersaji potret penduduk Bali usia 15 tahun ke atas menurut kemampuan baca tulis dan jenis kelamin tahun 2013.

Gambar 3
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013



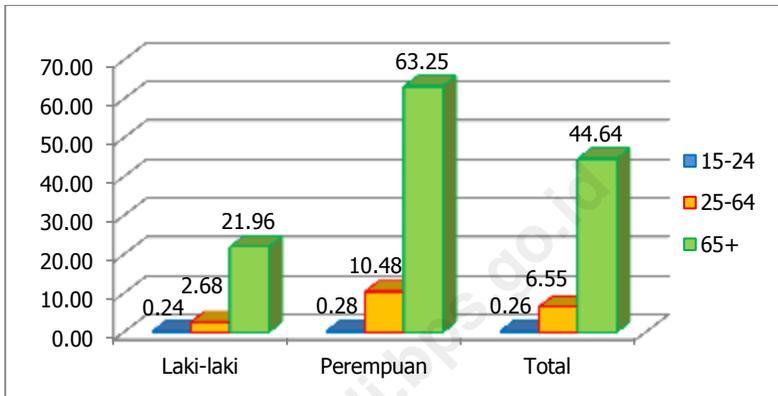
Sumber : Susenas 2013

Bila dilihat menurut gender, buta huruf kaum perempuan lebih tinggi dari kaum lelaki. Angka buta huruf perempuan tahun 2013 sebesar 13,95 persen, menurun sebesar 1,02 poin dibandingkan tahun 2012. Sedangkan angka buta huruf laki-laki hanya 4,00 persen. Keadaan ini perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Bali. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG'S dapat terwujud tuntas di tahun 2015.

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Sehingga program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Gambar 4 menyajikan angka buta

aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-64 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun ke atas), di Bali tahun 2013.

Gambar 4
Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur,
Provinsi Bali Tahun 2013



Sumber : Susenas 2013

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok umur 65 tahun keatas atau pada kelompok lansia. Secara total laki-perempuan, sebesar 44,64 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok lain, kelompok dewasa terdapat 6,55 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok umur remaja hanya sebesar 0,26 persen saja yang buta aksara. Jika dilihat perkembangannya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta aksara dari tahun ke tahun cenderung menurun, baik itu dari kelompok penduduk remaja, dewasa, maupun lansia. Dilihat sisi gender, di semua kelompok umur, buta huruf perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meski sudah dilakukan program pengentasan, tetapi buta huruf perempuan masih tetap tinggi, ini terjadi karena kebanyakan perempuan di desa sibuk dengan urusan rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti

pendidikan. Jika dilihat lebih rinci, di kelompok umur remaja selisih buta huruf perempuan dengan laki-laki hampir tidak terlihat. Menurunnya perbedaan gender dan kecilnya angka buta huruf di usia remaja menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan dan semakin menipisnya bias gender di masyarakat.

4.3. PENDUDUK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan kedalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, dengan melaksanakan berbagai program kearah tersebut. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan adalah dengan melaksanakan program pembangunan pendidikan untuk semua (*Education for All/EFA*). Program EFA diarahkan pada upaya-upaya memberikan pendidikan secara terus menerus kepada semua penduduk usia 7 hingga 18 tahun sehingga diharapkan tidak ada penduduk di usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Pada tahun 2013, tercatat terjadi peningkatan penduduk yang masih mengenyam bangku pendidikan. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang masih bersekolah sebesar 92,96 persen atau meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan penduduk usia 7-18 tahun yang masih bersekolah secara otomatis menurunkan persentase mereka yang keluar dari bangku pendidikan. Namun demikian, pada tahun 2013 masih terdapat penduduk Bali usia 7-18 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 0,45 persen. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,71 persen. Jika dilihat berdasarkan gender, penduduk usia 7-18 tahun yang tergolong dalam kategori tidak sekolah selalu lebih tinggi pada kelompok perempuan

dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaan ini menurun dibandingkan tahun 2013.

Dilihat dari sebaran wilayahnya, tergambar bahwa persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Tabel 5 menunjukkan bahwa di daerah pedesaan persentase penduduk yang tidak pernah/belum sekolah dan tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 8,85, sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang mencapai 5,83 persen. Tingginya penduduk yang tidak bersekolah di daerah pedesaan dimungkinkan disebabkan oleh program-program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah lebih menunjukkan hasil di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Tabel 5
Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah,
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013

Partisipasi Sekolah	Pedesaan			Perkotaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0,43	1,19	0,80	0,12	0,30	0,21	0,25	0,66	0,45
2. Masih sekolah	91,0	91,2	91,1	94,8	93,4	94,1	93,3	92,58	92,9
	5	7	5	1	8	7	1		6
3. Tidak bersekolah lagi	8,52	7,54	8,05	5,06	6,22	5,62	6,44	6,76	6,60
4. Jumlah 1 dan 3	8,95	8,73	8,85	5,19	6,52	5,83	6,69	7,42	7,04

Sumber : Susenas 2013

Ada beberapa alasan yang diduga sebagai penyebab tidak dapat atau belum memperoleh kesempatan pendidikan diantaranya adalah karena tidak ada biaya, mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mengurus rumah tangga/menikah, lokasi sekolah jauh, atau alasan lain yang menyebabkan mereka tidak bisa memperoleh/melanjutkan pendidikan.

Tabel 6
 Persentase Penduduk 7-18 Tahun Menurut Alasan
 Tidak Bersekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013

Alasan tdk/blm pernah sekolah/tdk bersekolah lagi	Jenis Kelamin		
	Laki	Prp	Laki + Prp
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak ada biaya	40,86	41,89	41,38
2. Bekerja/mencari nafkah	15,48	24,59	20,12
3. Menikah/mengurus rt	0,45	7,42	4,00
4. Merasa pendidikan cukup	0,08	1,64	0,88
5. Belum Cukup Umur	0,00	0,00	0,00
6. Malu karena ekonomi	1,24	2,83	2,05
7. Sekolah jauh	0,75	0,63	0,69
8. Cacat	4,21	8,35	6,32
9. Menunggu pengumuman	5,30	0,00	2,60
10. Tidak diterima	0,00	0,00	0,00
11. Lainnya	31,63	12,66	21,97
Total Bali	100	100	100,00

Sumber : Susenas 2013

Dari 11 kelompok alasan responden dapat mengenyam pendidikan seperti yang ditabelkan pada Tabel 6, terlihat bahwa alasan tidak ada biaya merupakan alasan dengan persentase tertinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, dari seluruh penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah sebanyak 41,38 persen diantaranya tidak sekolah dengan alasan karena tidak ada biaya. Dilihat dari sudut pandang gender, persentase penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang tidak sekolah karena tidak ada biaya lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Bekerja/mencari nafkah menjadi urutan kedua jawaban terbanyak setelah jawaban tidak ada biaya, disusul dengan alasan kecacatan.

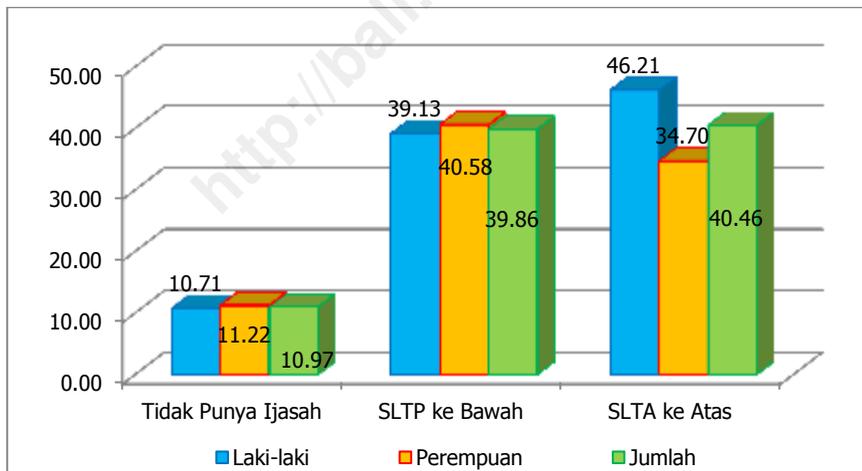
4.4. TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Tahun 2013 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Bali

terbanyak berada pada kategori SLTA ke atas, yaitu sebesar 40,46 persen, dan terkecil pada kategori tidak punya ijazah, sebesar 10,97 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Komposisi ini menunjukkan cukup baiknya kualitas SDM penduduk Bali di tahun 2013.

Dari sudut pandang gender, perlu diperhatikan bahwa masih ada tendensi diskriminatif terhadap kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. Ketimpangan pemerataan tingkat pendidikan yang ditamatkan perempuan hanya unggul pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah saja. Ditingkat SLTA ke atas tingkat pendidikan kaum perempuan berada di bawah laki-laki. Pola semacam ini terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Provinsi Bali 2013



Sumber : Susenas 2013

<http://bali.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Dari hasil kajian data susenas 2013 sebelumnya, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan khususnya di Provinsi Bali :

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (4-6 tahun) baru mencapai 51,52 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu khususnya bagi Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Jembrana, dimana capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Bali.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan, (SD, SLTP, dan SLTA) Provinsi Bali, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah dari penduduk perempuan. Diduga masih ada diskriminasi gender, dimana laki-laki masih dipandang sebagai figur utama pada program pendidikan 7 hingga 18 tahun.
3. Hingga tahun 2013 di Bali masih terdapat 8,97 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Sebaran penduduk buta huruf di Bali sebagian besar ada di Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng.

4. Di Bali masih ada sekitar 7,04 persen dari penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah. Dilihat dari segi gender, persentase penduduk perempuan yang tidak bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tiga alasan utama yang dikemukakan oleh penduduk usia 7-18 tahun sehingga menyebabkan mereka tidak bersekolah adalah karena tidak ada biaya, bekerja/mencari nafkah, dan cacat.
5. Kualitas SDM penduduk Bali tahun 2013 cukup baik, hal ini terlihat dengan semakin tingginya kategori jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

E-mail: bps5100@bps.go.id

